

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian, & Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amanat, Taufik. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Arbitrase*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2021. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Irsan Nasarudin, M. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman. 2009. *Aspek Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2021. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shubhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Situmorang, Victor, & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. 1982. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Tandellilin, E. 2017. *Pasar Modal Manajemen Portfolio & Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius.

PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 Angka 13, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Pasal 149 (1) dan Pasal 150 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 2021 tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi untuk memberikan perlindungan terhadap investor dalam pasar modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

ARTIKEL DAN WEBSITE

NBC Indonesia. 2023. "Nasib Investor Ritel di Kebangkrutan Forza Land." <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230530135153-128-441803/nasib-investor-ritel-di-kebangkrutan-forza-land>. Diakses pada 8 September 2024, pukul 19.34 WITA.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Peraturan Tentang Kurator dan Likuidasi Perusahaan yang Pailit*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. "Emiten dan Perusahaan Publik." <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/emiten-dan-perusahaan>. Diakses pada 8 September 2024, pukul 19.34 WITA.